



BADAN PENDAPATAN DAERAH  
KABUPAEN KETAPANG

## LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) DAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH (LPPD)



# 2021

[www.bapenda.ketapangkab.go.id](http://www.bapenda.ketapangkab.go.id)

**FORMAT PENGISIAN BAB III LKPI**

**URUSAN : PEMERINTAHAN ( MANAJEMEN KEUANGAN )**

**A. RINGKASAN DAERAH PELAKSANA : BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN KETAPANG**

Ringkasan Kinerja dan capaian indikator kinerja Urusan Pemerintahan (Manajemen Keuangan) yang dilaksanakan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ketapang adalah sebagai berikut :

**TABEL RINGKASAN KINERJA KEGIATAN UTAMA**

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	PERMASALAHAN	SOLUSI	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5.	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN							
5.2.	KEUANGAN							
5.2.1..	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota							
5.2.1.2.01.		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						
5.2.1.2.01.1			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 Dok	8 Dok	Tidak terdapat permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan ini.	Tidak ada.	
5.2.1.2.01.2			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dok	1 Dok	Tidak terdapat permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan ini.	Tidak ada.	
5.2.1.2.01.3			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dok	1 Dok	Tidak terdapat permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan ini.	Tidak ada.	
5.2.1.2.01.4			Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1 Dok	1 Dok	Tidak terdapat permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan ini.	Tidak ada.	

5.2.1.2.01.5			Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	1 Dok	1 Dok	Tidak terdapat permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan ini.	Tidak ada.	
5.2.1.2.01.6			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Dok	3 Dok	Tidak terdapat permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan ini.	Tidak ada.	
5.2.1.2.01.7			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Dok	2 Dok	Tidak terdapat permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan ini.	Tidak ada.	
5.2.1.2.02.		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						
5.2.1.2.02.1			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	12 Dok	11 Dok	Tidak terdapat permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan ini.	Tidak ada.	
5.2.1.2.02.2			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dok	12 Dok	Tidak terdapat permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan ini.	Tidak ada.	
5.2.1.2.02.3			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dok	12 Dok	Tidak terdapat permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan ini.	Tidak ada.	
5.2.1.2.02.5			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Dok	1 Dok	Tidak terdapat permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan ini.	Tidak ada.	
5.2.1.2.02.7			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Dok	1 Dok	Tidak terdapat permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan ini.	Tidak ada.	
5.2.1.2.03.		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						
5.2.1.2.03.6			Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Dok	1 Dok	Tidak terdapat permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan ini.	Tidak ada.	
5.2.1.2.05.		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						
5.2.1.2.05.9			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	10 Org	5 Org	Tidak terdapat permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan ini.	Tidak ada.	
5.2.1.2.06.		Administrasi Umum Perangkat Daerah						

5.2.1.2.06.1			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12 Bln	12 Bln	Tidak terdapat permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan ini.	Tidak ada.	
5.2.1.2.06.4			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	130 Org	129 Org	Tidak terdapat permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan ini.	Tidak ada.	
5.2.1.2.06.5			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	37 Jenis	37 Jenis	Tidak terdapat permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan ini.	Tidak ada.	
5.2.1.2.06.6			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	4 Unit	4 Unit	Tidak terdapat permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan ini.	Tidak ada.	
5.2.1.2.06.9			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	64 Kali	59 Kali	Tidak terdapat permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan ini.	Tidak ada.	
5.2.1.2.07.		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						
5.2.1.2.07.5			Pengadaan Mebel	60 Unit	60 Unit	Tidak terdapat permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan ini.	Tidak ada.	
5.2.1.2.07.10			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	6 Unit	6 Unit	Tidak terdapat permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan ini.	Tidak ada.	
5.2.1.2.07.11			Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	12 Bln	7 Bln	Tidak terdapat permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan ini.	Tidak ada.	
5.2.1.2.08.		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						
5.2.1.2.08.1			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1660 Lbr	1.162 Lbr	Tidak terdapat permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan ini.	Tidak ada.	
5.2.1.2.08.2			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	3 Jenis	2 Jenis	Tidak terdapat permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan ini.	Tidak ada.	
5.2.1.2.08.4			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Bln	12 Bln	Tidak terdapat permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan ini.	Tidak ada.	

5.2.1.2.09.		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						
5.2.1.2.09.1			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	55 Unit	55 Unit	Tidak terdapat permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan ini.	Tidak ada.	
5.2.1.2.09.9			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	12 Bln	11 Bln	Tidak terdapat permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan ini.	Tidak ada.	
5.2.1.2.09.10			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	108 Unit	108 Unit	Tidak terdapat permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan ini.	Tidak ada.	
5.2.1.2.09.11			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	38 Unit	38 Unit	Tidak terdapat permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan ini.	Tidak ada.	
5.2.4..	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH							
5.2.4.2.01.		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah						
5.2.4.2.01.1			Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	1 Dok	1 Dok	Tidak terdapat permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan ini.	Tidak ada.	-
5.2.4.2.01.2			Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	2 Dok	1 Dok	Tidak terdapat permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan ini.	Tidak ada.	-
5.2.4.2.01.3			Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	7 Keg	6 Keg	Tidak terdapat permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan ini.	Tidak ada.	-
5.2.4.2.01.4			Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	2 Apl	2 Apl	Tidak terdapat permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan ini.	Tidak ada.	-
5.2.4.2.01.5			Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	734 WP	681 WP	Tidak terdapat permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan ini.	Tidak ada.	-

5.2.4.2.01.6			Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	11 OP	10 OP	Tidak terdapat permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan ini.	Tidak ada.	-
5.2.4.2.01.7			Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	11 Pajak	11 Pajak	Tidak terdapat permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan ini.	Tidak ada.	-
5.2.4.2.01.8			Penetapan Wajib Pajak Daerah	136.965 OP	124.275 OP	Tidak terdapat permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan ini.	Tidak ada.	-
5.2.4.2.01.9			Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	1 Dok	1 Dok	Tidak terdapat permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan ini.	Tidak ada.	-
5.2.4.2.01.10			Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	20 Kec	20 Kec	Tidak terdapat permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan ini.	Tidak ada.	-
5.2.4.2.01.11			Penagihan Pajak Daerah	11 Dok	11 Dok	Tidak terdapat permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan ini.	Tidak ada.	-
5.2.4.2.01.12			Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	100 WP	96 WP	Tidak terdapat permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan ini.	Tidak ada.	-
5.2.4.2.01.13			Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	150 WP	150 WP	Tidak terdapat permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan ini.	Tidak ada.	-
5.2.4.2.01.14			Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	1 Dok	1 Dok	Tidak terdapat permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan ini.	Tidak ada.	-

TABEL CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DAERAH

No	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Satuan
1	Persentase Penerimaan Pendapatan Asli Daerah terhadap APBD	07,00%	10,76%	%

TABEL CAPAIAN KINERJA UTAMA PERANGKAT DAERAH

No	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Satuan
1	Penerimaan Pendapatan Asli Daerah	259.747.473.942,80	280.106.116.424,33	10,76%
	Jumlah APBD	2.414.436.303.354,80	2.407.856.879.809,01	11,63%

TABEL CAPAIAN INDIKATOR KINERJA KUNCI  
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

No	Program	Target	Realisasi	Satuan
1	Rasio PAD	07,00%	10,76%	%
2	Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD	07,00%	11,63%	%

TABEL CAPAIAN PROGRAM PRIORITAS

No	Program	Indikator Program Prioritas	Target	Realisasi	Satuan
1	Program Pengelolaan pendapatan Daerah	Persentase pengelolaan PAD	3.709.465.200,00	3.291.057.670,00	88,72%

## B. URAIAN PENJELASAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN

### 5....                    **UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**

### 5.2...                   **KEUANGAN**

### 5.2.4..                 **Program Pengelolaan Pendapatan Daerah**

### 5.2.4.2.01.           **Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah**

Kegiatan ini dilaksanakan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ketapang dan berlokasi di Kabupaten Ketapang dengan indikator kinerja program adalah Persentase Pengelolaan Pendapatan Daerah dengan Target Kinerja 100%. Sasaran strategis kegiatan ini adalah meningkatnya penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Ketapang yang jangka waktu pelaksanaannya diselenggarakan dalam kurun waktu 12 Bulan / 1 Tahun.

Kegiatan ini mendapat alokasi dukungan dana APBD sebelum perubahan sebesar Rp.3.009.465.200,00 setelah perubahan sebesar Rp. 3.709.465.200,00 dengan realisasi penggunaan dana sebesar Rp. 3.291.057.670,00 atau 88,72%.

#### **Permasalahan :**

Secara keseluruhan permasalahan dalam **Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah** yang diselenggarakan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ketapang diantaranya :

1. Potensi Objek Pajak Daerah dan Retribusi Daerah masih belum ter-update
2. Penerapan sanksi hukum belum maksimal
3. Kurangnya sarana dan prasarana pendukung
4. Terbatasnya jumlah ASN di Bapenda
5. Kapabilitas sumber daya ASN di Bapenda masih terbatas
6. Kesadaran masyarakat tentang pentingnya Pajak Daerah bagi pembangunan Kabupaten Ketapang masih sangat rendah
7. Kondisi perekonomian masyarakat Kabupaten Ketapang yang menurun pasca pandemi covid 19 berkepanjangan.

#### **Solusi :**

1. Melakukan survey serta kajian berkaitan dengan peningkatan pelayanan masyarakat agar berbanding lurus dengan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pajak
2. Melakukan kajian dalam rangka menggali data potensi masing-masing Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD).
3. Peningkatan kualitas dan profesionalisme ASN sesuai tuntutan kebutuhan pemenuhan SDM yang handal dengan mengikuti pendidikan dan pelatihan sesuai dengan kebutuhan organisasi.
4. Penyusunan SOP yang jelas dalam setiap pelayanan PDRD, mengaktifkan tim saber pungli, membentuk Tim Sita yang terdiri dari Pol PP, Kejaksaan dan pihak terkait.
5. Secara konsisten dilakukan sosialisasi tentang pentingnya Pajak Daerah bagi pembangunan Kabupaten Ketapang dengan mengikutsertakan instansi horizontal dan instansi vertikal di Kabupaten Ketapang.
6. Meningkatkan kualitas pelayanan Online satu pintu dengan sistem yang di miliki oleh Bapenda, sehingga jika ada perubahan data, dapat langsung di update
7. Melakukan identifikasi isu sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi). Kemudian membuat *time schedule* terkait pemecahan isu tersebut.
8. Melakukan kerjasama dengan instansi terkait baik lingkup daerah maupun propinsi.
9. Memberikan stimulus WP berkenaan pembayaran pajak dimasa pandemi virus Covid-19 berupa penghapusan bunga, denda dan kenaikan pajak bagi wajib pajak atas tunggakan Pajak Daerah serta menunda kenaikan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP).

### 5.2.4.2.01.1           **Sub Kegiatan Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah**

Sub kegiatan ini di laksanakan pada Bidang Pengelolaan Penerimaan Daerah dengan Indikator kinerja sub kegiatan ini adalah Jumlah Dokumen Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah dimana Target Kinerja 1 Dokumen dan realisasi kinerja 1 Dokumen. Sasaran kegiatan ini adalah tersusunnya perencanaan pengelolaan pajak daerah yang jangka waktu pelaksanaannya diselenggarakan dalam kurun waktu 12 Bulan / 1 Tahun



Berdasarkan Perjanjian Kinerja Sub kegiatan ini dikelola oleh Kasubbid Pemungutan dan Penagihan ini mendapat alokasi dukungan dana APBD sebelum perubahan dan setelah perubahan sebesar Rp. 200.000.000,00 dengan realisasi penggunaan dana sebesar Rp. 123.201.700,00 atau 61,60%.

**Permasalahan :**

- Serapan untuk alokasi biaya Perjalanan Dinas tidak terserap sepenuhnya hal ini disebabkan adanya himbauan untuk tidak melakukan Perjalanan Dinas dikarenakan penyebaran Covid-19 pada saat itu cukup tinggi.

**Solusi :**

- Alokasi biaya Perjalanan Dinas akan disesuaikan dengan keadaan.

**5.2.4.2.01.2 Sub Kegiatan Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah**

Sub kegiatan ini di laksanakan pada Bidang Pengelolaan Penerimaan Daerah dengan Indikator kinerja sub kegiatan ini adalah Jumlah Dokumen Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah dimana Target Kinerja 2 Dokumen dan Realisasi Kinerja 1 Dokumen. Sasaran kegiatan ini adalah terlaksananya Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta penyusunan kebijakan pajak daerah yang jangka waktu pelaksanaannya diselenggarakan dalam kurun waktu 12 Bulan / 1 Tahun.

Berdasarkan Perjanjian Kinerja Sub kegiatan ini dikelola oleh Kasubbid Verifikasi dan Penetapan ini mendapat alokasi dukungan dana APBD sebelum perubahan dan setelah perubahan sebesar Rp. 110.000.000,00 dengan realisasi penggunaan dana sebesar Rp. 40.491.880,00 atau 36,81%.

**Permasalahan :**

- Serapan untuk alokasi biaya Perjalanan Dinas tidak terserap sepenuhnya hal ini disebabkan adanya himbauan untuk tidak melakukan Perjalanan Dinas dikarenakan penyebaran Covid-19 pada saat itu cukup tinggi.

**Solusi :**

- Alokasi biaya Perjalanan Dinas akan disesuaikan dengan keadaan.

**5.2.4.2.01.3 Sub Kegiatan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah**

Sub kegiatan ini dilaksanakan pada Bidang Pengendalian dan P3D dengan Indikator kinerja sub kegiatan ini adalah Jumlah Terasilinasinya Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah dimana Target Kinerja 7 Kegiatan dengan Realisasi Kinerja 6 Kegiatan. Sasaran kegiatan ini adalah tercapainya penyuluhan dan penyebarluasan kebijakan pajak daerah yang jangka waktu pelaksanaannya diselenggarakan dalam kurun waktu 12 Bulan / 1 Tahun.

Berdasarkan Perjanjian Kinerja Sub kegiatan ini dikelola oleh Kasubbid Keberatan, Keringanan dan Informasi ini mendapat alokasi dukungan dana APBD sebelum perubahan sebesar Rp. 100.000.000,00 dan setelah perubahan sebesar Rp. 310.220.000,00 dengan realisasi penggunaan dana sebesar Rp. 250.275.569,00 atau 83,09%.

**Permasalahan :**

- Dalam rangka optimalisasi penerimaan Pajak Daerah, Pemerintah Kabupaten Ketapang dibantu Kejaksaan Negeri Ketapang dalam melaksanakan kegiatan penagihan, pendataan, dan sosialisasi ke Wajib Pajak Daerah. Untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan tersebut Kejaksaan Negeri Ketapang dialokasikan anggaran penunjang kegiatan sebesar Rp 150.000.000,00 yang di anggarkan di dalam Sub Kegiatan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah. Selama tahun 2021, dari total anggaran sebesar Rp. 150.000.000,00 terdapat anggaran perjalanan dinas luar daerah sebesar Rp. 50.944.431,00 yang tidak dapat diserap. Kondisi tersebut dikarenakan sebagai akibat pandemi Covid 19

yang membuat kegiatan penagihan, pendataan, dan sosialisasi terbatas dilakukan di wilayah Kabupaten Ketapang khususnya di Kecamatan Delta Pawan.

**Solusi :**

- Di tahun 2022, penganggaran Perjalanan Dinas luar daerah akan dilakukan lebih cermat dengan memperhatikan status PPKM di luar Kabupaten Ketapang.

**5.2.4.2.01.4 Sub Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah**

Sub kegiatan ini dilaksanakan pada Bidang Pengendalian dan P3D dengan Indikator kinerja sub kegiatan ini adalah Jumlah Terasilitasinya Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah dimana Target Kinerja 2 Aplikasi dengan Realisasi Kinerja 2 Aplikasi. Sasaran kegiatan ini adalah tercapainya penyediaan sarana dan prasaran pengelolaan pajak daerah yang jangka waktu pelaksanaannya diselenggarakan dalam kurun waktu 12 Bulan / 1 Tahun..

Berdasarkan Perjanjian Kinerja Sub kegiatan ini dikelola oleh Kasubbid Pengendalian, Pemeriksaan dan Potensi Pendapatan Daerah ini mendapat alokasi dukungan dana APBD sebelum perubahan sebesar Rp. 197.200.000,00 dan setelah perubahan sebesar Rp. 330.200.000,00 dengan realisasi penggunaan dana sebesar Rp. 301.275.000,00 atau 90,42%.

**Permasalahan :** Tidak terdapat permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan ini

**Solusi :** Tidak ada

**5.2.4.2.01.5 Sub Kegiatan Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah**

Sub kegiatan ini di laksanakan pada Bidang Pengelolaan Penerimaan Daerah Indikator kinerja sub kegiatan ini adalah Jumlah Jumlah Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah dimana Target Kinerja 734 Wajib Pajak dengan Realisasi Kinerja 681 Wajib Pajak. Sasaran kegiatan ini adalah terlaksananya pendataan dan pendaftaran objek pajak daerah yang jangka waktu pelaksanaannya diselenggarakan dalam kurun waktu 12 Bulan / 1 Tahun.

Berdasarkan Perjanjian Kinerja Sub kegiatan ini dikelola oleh Kasubbid Pendaftaran dan Pendataan ini mendapat alokasi dukungan dana APBD sebelum perubahan dan setelah perubahan sebesar Rp. 250.000.000,00 dengan realisasi penggunaan dana sebesar Rp. 231.813.232,00 atau 92,73%.

**Permasalahan :** Tidak terdapat permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan ini

**Solusi :** Tidak ada

**5.2.4.2.01.6 Sub Kegiatan Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah**

Sub kegiatan ini dilaksanakan pada Bidang Pelaporan Evaluasi Pendapatan Daerah dengan Indikator kinerja sub kegiatan ini adalah Terasilitasinya Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah dimana Target Kinerja 11 Objek Pajak dengan Realisasi Kinerja 10 Objek Pajak. Sasaran kegiatan adalah tercapainya pengolahan, pemeliharaan dan pelaporan basis data pajak daerah yang jangka waktu pelaksanaannya diselenggarakan dalam kurun waktu 12 Bulan / 1 Tahun.

Berdasarkan Perjanjian Kinerja Sub kegiatan ini dikelola oleh Kasubbid Pembukuan, Penerimaan, Persediaan dan Evaluasi ini mendapat alokasi dukungan dana APBD sebelum perubahan sebesar Rp. 315.000.000,00 dan setelah perubahan sebesar Rp 729.000.000,00 dengan realisasi penggunaan dana sebesar Rp. 663.555.103,00 atau 91,02%.

**Permasalahan :**

1. Serapan untuk alokasi biaya Perjalanan Dinas tidak terserap sepenuhnya hal ini disebabkan adanya himbauan untuk tidak melakukan Perjalanan Dinas dikarenakan penyebaran Covid-19 pada saat itu cukup tinggi.
2. Semula teralokasikan anggaran Bonus Desa sebesar Rp. 133.000.000,- namun tidak bisa direalisasikan karena dasar pengeluaran anggaran yakni PERBUP tidak bisa diterbitkan. Oleh karena itu anggaran dilakukan penggeseran pada Anggaran Perubahan tahun 2021. Penggeseran tersebut menjadi Belanja Modal

**Solusi :**

1. Alokasi biaya Perjalanan Dinas akan disesuaikan dengan keadaan.
2. Bonus Desa tidak bisa diberikan dalam bentuk uang, yang bisa diberikan dalam bentuk barang/piala atas prestasi. Oleh karena itu pengalokasian anggaran dalam penyusunan RKA lebih realistis dan mengacu pada aturan yang tersedia.

**5.2.4.2.01.7 Sub Kegiatan Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)**

Sub kegiatan ini di laksanakan pada Bidang Pengelolaan PBB dan BPHTB dengan Indikator kinerja sub kegiatan ini adalah Terfasilitasinya Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dimana Target Kinerja 11 Pajak dengan Realisasi Kinerja 11 Pajak. Sasaran kegiatan ini adalah tercapainya penilaian pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) serta tercapainya pelayanan dan konsultasi pajak daerah yang jangka waktu pelaksanaannya diselenggarakan dalam kurun waktu 12 Bulan / 1 Tahun Anggaran.

Berdasarkan Perjanjian Kinerja Sub kegiatan ini dikelola oleh Kasubbid Pendaftaran, Pendataan dan Penilaian PBB dan BPHTB ini mendapat alokasi dukungan dana APBD sebelum perubahan dan setelah perubahan sebesar Rp. 200.000.000,00 dengan realisasi penggunaan dana sebesar Rp. 197.209.550,00 atau 98,60%.

**Permasalahan :**

1. Alokasi perjalanan dinas untuk melakukan Penilaian tidak sepenuhnya diserap
2. karena kasus peningkatan Covid 19 sehingga pembatasan kegiatan tatap muka

**Solusi :**

- Alokasi penganggaran harus fleksibel dan realistis dalam menyesuaikan situasi saat ini (Covid 19)

**5.2.4.2.01.8 Sub Kegiatan Penetapan Wajib Pajak Daerah**

Sub kegiatan ini di laksanakan pada Bidang Pengelolaan PBB dan BPHTB dengan Indikator kinerja sub kegiatan ini adalah Jumlah Penetapan Wajib Pajak Daerah dengan Target Kinerja 136.956 Objek Pajak dengan Realisasi Kinerja 124.275 Objek Pajak. Sasaran kegiatan ini adalah tercapainya penetapan wajib pajak daerah yang jangka waktu pelaksanaannya diselenggarakan dalam kurun waktu 12 Bulan / 1 Tahun Anggaran.

Berdasarkan Perjanjian Kinerja Sub kegiatan ini dikelola oleh Kasubbid Verifikasi dan Penetapan ini mendapat alokasi dukungan dana APBD sebelum perubahan dan setelah perubahan sebesar Rp. 250.000.000,00 dengan realisasi penggunaan dana sebesar Rp. 226.836.678,00 atau 90,73%.

**Permasalahan :**

1. Alokasi perjalanan dinas dalam daerah tidak sepenuhnya dapat dilaksanakan karena pembatasan kegiatan akibat pandemi penyebaran Covid -19

**Solusi :**

Alokasi perjalanan dinas lebih realistis dan sesuai keadaan

#### **5.2.4.2.01.9 Sub Kegiatan Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah**

Sub kegiatan ini di laksanakan pada Bidang Pengelolaan PBB dan BPHTB dengan Indikator kinerja sub kegiatan ini adalah Terfasilitasinya Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah dengan Target Kinerja 1 Dokumen dengan Realisasi Kinerja 1 Dokumen. Sasaran kegiatan ini adalah tercapainya pelayanan dan konsultasi pajak daerah yang jangka waktu pelaksanaannya diselenggarakan dalam kurun waktu 12 Bulan / 1 Tahun Anggaran.

Berdasarkan Perjanjian Kinerja Sub kegiatan ini dikelola oleh Kasubbid Pendaftaran, Pendataan dan Penilaian PBB dan BPHTB ini mendapat alokasi dukungan dana APBD sebelum perubahan dan setelah perubahan sebesar Rp. 300.000.000,00 dengan realisasi penggunaan dana sebesar Rp. 271.199.900,00 atau 90,40%.

##### **Permasalahan :**

1. Alokasi biaya jasa administrasi kantor tidak dapat dibayarkan sepenuhnya karena adanya tenaga kontrak yang berhenti.
2. Alokasi perjalanan dinas untuk melakukan pelayanan tidak sepenuhnya diserap karena kasus peningkatan Covid 19 sehingga pembatasan kegiatan tatap muka.

##### **Solusi :**

- Alokasi penganggaran harus fleksibel dan realistis dalam menyesuaikan situasi saat ini (Covid 19)

#### **5.2.4.2.01.10 Sub Kegiatan Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah**

Sub kegiatan ini dilaksanakan pada Bidang Pelaporan Evaluasi Pendapatan Daerah Indikator kinerja sub kegiatan ini adalah Terfasilitasinya Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah dimana Target Kinerja 20 Kecamatan dengan Realisasi Kinerja 20 Kecamatan. Sasaran kegiatan adalah tercapainya penelitian dan verifikasi data pelaporan pajak daerah yang jangka waktu pelaksanaannya diselenggarakan dalam kurun waktu 12 Bulan / 1 Tahun.

Berdasarkan Perjanjian Kinerja Sub kegiatan ini dikelola oleh Kasubbid Pelaporan, Retitusi dan Pengelolaan Piutang Pajak Daerah dan mendapat alokasi dukungan dana APBD sebelum perubahan dan setelah perubahan sebesar Rp. 150.000.000,00 dengan realisasi penggunaan dana sebesar Rp .146.261.000,00 atau 97,51%.

##### **Permasalahan :**

- ✓ Permasalahan terjadi pada saat honorarium tim tidak bisa dibayarkan ke salah satu anggota tim dikarenakan pejabat dimaksud merupakan pelaksana tugas (Plt) pada jabatan yang lain. Maka honorarium yang diberikan adalah honorarium yang melekat pada jabatan definitif yang bersangkutan, sedangkan jabatan pelaksana tugas (Plt) tidak diberikan.

##### **Solusi :**

- ✓ Pematangan dalam perencanaan penyusunan anggaran.

#### **5.2.4.2.01.11 Sub Kegiatan Penagihan Pajak Daerah**

Sub kegiatan ini di laksanakan pada Bidang Pengelolaan PBB dan BPHTB dengan Indikator kinerja sub kegiatan ini adalah Terfasilitasinya Penagihan Pajak Daerah dimana Target Kinerja 11 Dokumen dan Realisasi Kinerja 11 Dokumen. Sasaran kegiatan ini adalah tercapainya penagihan pajak daerah yang jangka waktu pelaksanaannya diselenggarakan dalam kurun waktu 12 Bulan / 1 Tahun.

Berdasarkan Perjanjian Kinerja Sub kegiatan ini dikelola oleh Kasubbid Pemungutan dan Penagihan PBB dan BPHTB Sub kegiatan ini mendapat alokasi dukungan dana APBD sebelum perubahan dan setelah perubahan sebesar Rp. 270.000.000,00 dengan realisasi penggunaan dana sebesar Rp. 269.850.000,00 atau 99,94%.

**Permasalahan :**

- Terdapat alokasi biaya untuk pembulatan anggaran

**Solusi :**

- Alokasi yang realistis

**5.2.4.2.01.12 Sub Kegiatan Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah**

Sub kegiatan ini dilaksanakan pada Bidang Pengendalian dan P3D dengan Indikator kinerja sub kegiatan ini adalah Terasilitasinya Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah dimana Target Kinerja 100 Wajib Pajak dengan Realisasi Kinerja 96 Wajib Pajak. Sasaran kegiatan ini adalah tercapainya penyelesaian keberatan pajak daerah yang jangka waktu pelaksanaannya diselenggarakan dalam kurun waktu 12 Bulan / 1 Tahun.

Berdasarkan Perjanjian Kinerja Sub kegiatan ini dikelola oleh Kasubbid Keberatan, Keringanan dan Informasi ini mendapat alokasi dukungan dana APBD sebelum perubahan sebesar Rp. 180.000.000,00 dan setelah perubahan sebesar Rp. 139.428.000,00 dengan realisasi penggunaan dana sebesar Rp. 133.544.308,00 atau 95,78%.

**Permasalahan :**

- Sisa anggaran sebesar Rp. 5.883.692,00 merupakan perjalanan dinas yang tidak dapat diserap sebagai akibat perubahan standar biaya perjalan dinas yang di atur di dalam Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2019 Tentang Pedoman Perjalanan Dinas Dalam Negeri.

**Solusi :**

- Di tahun 2022, penganggaran Belanja Pegawai dan Belanja Barang dan Jasa akan lebih cermat dan teliti dengan memperhatikan standar biaya perjalanan dinas terbaru.

**5.2.4.2.01.13 Sub Kegiatan Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah**

Sub kegiatan ini dilaksanakan pada Bidang Pengendalian dan P3D dengan Indikator kinerja sub kegiatan ini adalah Terasilitasinya Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah dimana Target Kinerja 150 Wajib Pajak dengan Realisasi Kinerja 150 Wajib Pajak. Sasaran kegiatan ini adalah tercapainya pengendalian, pemeriksaan dan pengawasan pajak daerah yang jangka waktu pelaksanaannya diselenggarakan dalam kurun waktu 12 Bulan / 1 Tahun.

Berdasarkan Perjanjian Kinerja Sub kegiatan ini dikelola oleh Kasubbid Pengendalian, Pemeriksaan dan Potensi Pendapatan Daerah ini mendapat alokasi dukungan dana APBD sebelum perubahan sebesar Rp. 150.000.000,00 dan setelah perubahan sebesar Rp. 139.352.000,00 dengan realisasi penggunaan dana sebesar Rp. 138.991.500,00 atau 99,74%.

**Permasalahan :**

- Sisa anggaran sebesar Rp. 360.000,00 merupakan belanja perjalanan dinas yang tidak dapat terserap, sedangkan sisa anggaran sebesar Rp 500,00 merupakan belanja fotocopy yang tidak dapat terserap.

**Solusi : Tidak ada**

#### 5.2.4.2.01.14 Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Sub kegiatan ini di laksanakan pada Bidang Pengelolaan Penerimaan Daerah Indikator kinerja sub kegiatan ini adalah Jumlah Dokumen Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi dimana Target Kinerja 1 Dokumen dengan realisasi kinerja 1 Dokumen. Sasaran kegiatan ini adalah terlaksananya pembinaan dan pengawasan pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah yang jangka waktu pelaksanaannya diselenggarakan dalam kurun waktu 12 Bulan / 1 Tahun.

Berdasarkan Perjanjian Kinerja Sub kegiatan ini dikelola oleh Kasubbid Pemungutan dan Penagihan ini mendapat alokasi dukungan dana APBD sebelum perubahan dan setelah perubahan sebesar Rp. 337.265.200,00 dengan realisasi penggunaan dana sebesar Rp. 296.552.250,00 atau 87,93%.

**Permasalahan :** Tidak terdapat permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan ini

**Solusi :** Tidak ada

Ketapang, Februari 2022  
Kepala Badan Pendapatan Daerah  
Kabupaten Ketapang



**Drs. P. Devie Frantito, M.M**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19700411 199003 1 004